

Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pilkada di Jombang

Atiqotul Maula

IKA-Siyasab Yogyakarta. Email: manla.atiqo@yahoo.com

Abstrak: Perempuan merupakan makhluk Tuhan yang diberikan begitu banyak anugerah, merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa. keterlibatannya dalam segala aspek kehidupan mempunyai warna khusus. Seperti halnya keterlibatannya dalam dunia politik adalah sebuah keniscayaan. untuk mengagomodir segala kepentingan perempuan dalam kebijakannya. untuk memberi warna baru bagi dunia politik. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik pada masa sekarang sudah tidak terhindarkan lagi. Hal ini menjadikan wacana dan isu perempuan menjadi isu strategis baik ditingkat internasional, nasional maupun lokal. Hal ini didukung oleh kebebasan perempuan sebagai manusia yang merdeka dan bebas. Adanya kebebasan untuk menentukan pilihan menjadi salah satu pendukung masuknya perempuan dalam dunia politik. Hasil penelitian tentang perempuan dan politik dalam kontestasi Pilkada di Jombang yang dialami oleh Hj Munjidah Wahab didalamnya adalah merubah paradigma berfikir kaum laki-laki yang bias gender untuk memberikan ruang kepada perempuan dalam dunia politik, memiliki daya saing yang kuat dan berdaya agar dapat berperan lebih strategis dan optimal. Serta memberikan energi positif didalam relasi politik antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan sebuah Negara maupun daerah yang berkeadaban serta ramah perempuan. Hal ini tidak terlepas dari modal politik Hj. Munjidah Wahab yaitu modal kultural, dan modal simbolik, yang merupakan putri seorang Ulama' besar di Jombang.

Kata Kunci: *Perempuan, Politik, dan Pilkada*

Pendahuluan

Berbicara tentang perempuan, diujung dunia manapun selalu menjadi hal yang sangat menarik dan hangat untuk diperbincangkan, bukan saja karena sisi perempuannya, melainkan lebih kepada isu-isu yang diusung olehnya, yang senantiasa menjadi titik perbincangan menarik ditengah dunia yang di dominasi oleh kaum laki-laki.

Di era globalisasi saat ini, perhatian terhadap

pembangunan berbasis gender semakin besar, seperti yang diketahui bahwa hampir diseluruh negara telah terjadi diskriminasi gender. Ketidakadilan gender merupakan akibat adanya konstruk dari sistem sosial masyarakat yang salah satu jenis kelamin, baik itu laki- laki maupun perempuan menjadi korban. Akibat dari keyakinan dan membenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia, yang dalam hal ini seringkali perempuan lebih dirugikan yang berakibat pada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan terjadi di hampir segala bidang.

Secara konstitusional laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 pasal 28 yang menegaskan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Undang-undang tersebut merupakan cerminan dari negara demokrasi yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk berkiprah, termasuk perempuan.¹

Sejarah mencatat, sejak awal sebelum berdirinya negara Indonesia, nama- nama perempuan yang tidak asing yang dinobatkan sebagai pahlawan perempuan atas dedikasinya yang sangat luar biasa. Misalnya Raden Ajeng Kartini yang pemikirannya tertuang dalam sebuah karya yang diberi judul "Habis Gelap Terbitlah Terang" yang didalamnya memuat surat-surat yang ditulis kepada sahabatnya di negeri Belanda, hal ini merupakan bukti betapa besarnya mimpi dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari segala bentuk diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya. Selanjutnya Cut Nyak Dien nama perempuan dari Aceh merupakan salah satu dari perempuan berhati baja yang diusianya yang lanjut masih mencabut "rencong" dan berusaha melawan pasukan Belanda sebelum akhirnya ia ditangkap.

Apabila ditelisik lebih dalam peran perempuan sangat fundamental, misalnya didalam dunia pendidikan, perempuan

¹ Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: LKIS, 2015), hlm. 3

juga memiliki peranan yang sangat penting karena ia adalah guru pertama bagi anak-anaknya. realitas dalam keluarga, kebanyakan perempuan mendominasi urusan domestik, sedangkan urusan publik lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Dengan adanya emansipasi perempuan, membuka gerbang baru dalam eksistensi peran perempuan di Indonesia, yang bisa masuk dalam ranah-ranah yang dahulu hanya dikerjakan oleh kaum laki-laki saja, sehingga perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berperan dalam rangka mensukseskan pembangunan di Indonesia seutuhnya.

Di Indonesia, gambaran peran perempuan di bidang publik yang terkait dengan politik secara statistik masih belum menggembirakan. Hal itu dapat dicermati dari hasil pemilu dari tahun ke tahun. masih didominasi oleh kaum laki-laki yang dibuktikan dalam pemerintahan yang kebanyakan adalah laki-laki sebagai pejabat publik, baik di wilayah kepresidenan, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam fikih siyasah (politik) kaum perempuan sering dipandang tidak berhak menjadi pemimpin sebagai kepala pemerintahan.² sehingga dogma-dogma seperti itu membuat perempuan tidak tertarik dengan politik dan tidak sadar akan diskriminasi hak dan perannya.

Sebagaimana perempuan yang ikut berpartisipasi dalam politik sangat kecil dibanding dengan partisipasi kaum laki-laki, sehingga usulan yang dibuat oleh perempuan menghadapi tantangan dan hambatan. Diskriminasi Gender perempuan membuat sebagian mereka trauma untuk memberikan peluang bagi dirinya untuk terjun dalam dunia politik. Peran perempuan dalam menentukan arah kebijakan selalu terbungkam dan kalah oleh dominasi dan kepentingan kaum laki-laki.

Dalam hal ini, artinya bahwa dalam sosial masyarakat, perempuan masih dianggap tidak cukup mampu memimpin dan membuat kebijakan. Perempuan masih dianggap lebih mengutamakan emosionalitas daripada rasionalitas. Peran dan akses perempuan di dunia politik Indonesia pada umumnya

² Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, (Jakarta: Serambi, 2010), hlm.169

masih sangat terbatas. Data yang ada menunjukkan bahwa ruang gerak perempuan untuk duduk sebagai pengambil kebijakan politik di lembaga politik formal maupun informal masih sangat sempit, dengan berbagai kendala yang menghambat pemenuhan hak-hak politik perempuan masih banyak dijumpai,³ baik dalam bidang agama, sosial masyarakat, dan lain sebagainya.

Keterwakilan perempuan berada pada posisi terendah di tingkat kabupaten/kota, data yang dihimpun dari 29 dari total 491 kabupaten/kota menunjukkan bahwa rata-rata hanya 10% perempuan terwakili di pemerintah kabupaten.⁴ Kabupaten merupakan lapisan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan di daerah serta pelayanan sosial bagi masyarakatnya. Terbatasnya keterwakilan perempuan di pemerintah kabupaten dapat berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan, tidak teratasinya kekhawatiran perempuan, dan perioritas-perioritas pembangunan dalam rencana pembangunan daerah dan mungkin akan mempertegas marginalisasi terhadap perempuan dalam mendapatkan pelayanan sosial di tingkat lokal. Kurangnya kesempatan dalam memainkan peran yang penting dalam pemerintah daerah berdampak secara negatif pada kemungkinan bagi perempuan untuk mengambil posisi utama dikancah politik provinsi dan nasional.

Seperti halnya di Jombang, sebuah daerah yang dikenal dengan kota santri, karena banyaknya pesantren- pesantren yang berdiri di kota tersebut. pesantren merupakan salah satu media pendidikan di mana keyakinan, norma dan nilai- nilai islam ditransmisikan serta ditanamkan melalui aktivitas pengajaran. Dengan kata lain pesantren berfungsi sebagai pengembang ajaran islam dan pemelihara ortodoksi.⁵ Akibat

³ Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca Peformasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. 48

⁴ Farzana Bari, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*, (Jakarta: United Nation Development Programme (UNDP) Indonesia, 2010), hlm.7.

⁵ "Potret Perempuan dalam Pesantren (Analisis Semiotika Film

kuatnya ortodoksi, ideologisasi dan dogmatisme dalam tubuh pesantren, ajaran agama menjadi sangat normatif, simbolis, dan kurang responsif terhadap perkembangan masyarakat luar. dengan kultur pesantren yang sangat patriarki yang mana kultur yang penentu kebijakan adalah seorang yang biasa disebut dengan "Kyai" .yang merupakan seorang laki-laki, kyai melalui pesantrennya seringkali melanggar praktek bias gender dan budaya patriarki dalam berbagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi di lingkungan pesantren merupakan fenomena yang sangat sulit dihilangkan. Fenomena tersebut perempuan harus patuh, taat, dan tunduk terhadap aturan- aturan yang dibuat oleh laki-laki, yang berlandaskan pada dasar agama yang kadang diartikan secara mentah bahwa semestinya perempuan berada berkedudukan dibawah laki-laki yang terkadang hal tersebut dijadikan harga mutlak dalam memperlakukan perempuan tidak setara dengan laki-laki.

Konsep patriarki juga menggambarkan kekuasaan laki-laki secara umum dalam berbagai hal kehidupan masyarakat yang berada dibawah kekuasaan laki- laki, dimana konsep ini menentukan berbagai keputusan, kebijakan, peraturan, dan lain sebagainya yang menggambarkan kekuasaan laki-laki daripada memperhitungkan perempuan, akibatnya penjelasan-penjelasan hanya ditunjukkan kepada laki-laki dan tidak memperhitungkan peran perempuan sebagai bagian dari masyarakat.

Mansour Fakih (2001: 12) menyebutkan bahwa perbedaan gender melahirkan ketidakadilan laki-laki dan terutama bagi perempuan. menurutnya terdapat banyak manifestasi ketidakadilan gender diantaranya adalah *stereotype* dan subordinasi terhadap perempuan dapat dilihat dengan pewarisan tampuk kepemimpinan di kalangan pesantren biasanya atau regenerasi pemimpin pesantren biasanya diserahkan kepada anak laki-laki dari kyai atau jika tidak memiliki anak laki-laki biasanya diwariskan kepada saudara laki-laki, keponakan laki-laki atau menantu.

Perempuan Berkalung Sorban)," eprints.walisongo.ac.id/125/1/Silvia Tesis Bab1.pdf diakses tanggal 04 Januari 2016 pukul 08.07 WIB.

Hj. Munjidah Wahab adalah seorang putri dari salah satu Kyai besar di Jombang, yaitu KH. Wahab Hasbullah, seorang perempuan yang lahir pada tanggal 22 Mei 1948, yang dalam hal ini akan dibahas tentang keikutsertaannya dalam kontestasi pilkada di Jombang yang telah berlangsung pada tahun 2014 silam, keikutsertaannya begitu menarik untuk dibahas, karena Hj. Munjidah Wahab adalah seorang putri yang lahir di lingkungan pesantren yang kuat dengan dominasi laki-laki, dan juga merupakan perempuan pertama kali yang duduk sebagai Wakil Bupati Jombang yang selama ini jabatan itu diduduki oleh laki-laki.⁶ Dengan budaya pesantren yang kuat dengan dominasi laki-laki, Hj. Munjidah mampu mendobrak budaya tersebut, memunculkan pertanyaan dari penulis untuk mengidentifikasi kemunculan perempuan masuk dalam kontestasi Pilkada di Jombang.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah dalam penulisan kali ini sebagai berikut: Bagaimana Proses Hj. Munjidah Wahab sebagai aktor perempuan mampu masuk dalam kontestasi Pilkada di Jombang? Variabel-variabel apa saja yang menentukan terpilihnya Hj. Munjidah Wahab sebagai Wakil Bupati dalam kontestasi Pilkada di Jombang?

Perempuan Dalam Kontestasi Politik di Jombang

1. Perempuan Sebagai Aktor Politik

Sebuah masyarakat dapat dikatakan demokratis, jika dalam peri kehidupannya menghargai hak asasi manusia secara adil dan setara. Hal ini juga mencakup adanya jaminan partisipasi politik bagi semua warga. Yang salah satunya adalah partisipasi perempuan, karena merupakan salah satu prasyarat terlaksananya demokrasi. Karena tidak ada demokrasi yang sesungguhnya, jika masih terdapat pengingkaran kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga berakibat

⁶ <http://cyberdakwah.com/2014/11/nyai-hj-munjidah-wahab-wakil-bupati-jombang-yang-selalu-bugar/> diakses pada tanggal 04 Januari 2016 pukul 08.13 Wib

"tersingkirnya" perempuan dari gelanggang politik.⁷

Perempuan sebagai salah satu kelompok marginal sampai saat ini masih berada dalam posisi subordinat dibanding laki-laki. Meskipun secara kuantitatif jumlah perempuan lebih banyak, namun hal ini tidak berarti ada jaminan terhadap hak-hak mereka. Factor budaya merupakan salah satu penghambat bagi perempuan untuk tampil dalam ruang public. Kuatnya peran laki-laki dalam kehidupan publik, sangat menentukan setiap keputusan-keputusan yang diambil meskipun itu menyangkut tentang kehidupan perempuan. Hal ini menempatkan posisi perempuan semakin termarginalkan, terutama dalam partisipasi politik semata-mata karena mereka adalah perempuan. Inilah yang disebut sebagai diskriminasi gender.

Kehidupan demokrasi yang sejati merupakan suatu kehidupan dimana seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam bersuara dan didengar. Peran politik sangat penting untuk mendorong kebijakan berkeadilan sosial, terutama kebijakan yang berkaitan dengan perempuan. Sementara melalui kebijakan, hukum dapat berlaku melindungi kepentingan kaum perempuan dari berbagai bentuk kekerasan baik diwilayah domestic maupun publik.⁵⁶

Sementara salah satu kebutuhan hukum nasional dan masyarakat saat ini adalah keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu harus ada kebijakan- kebijakan baru yang lebih progresif dan lebih sesuai dengan situasi,kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Perwujudan keadilan dan kesetaraan gender merupakan agenda penting pemerintah saat ini dan kedepan. Perlu adanya tindakan nyata dari kaum perempuan di berbagai bidang seperti, bidang politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, pertahanan dan juga bidang keamanan.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik, pada masa sekarang sudah tidak terhindarkan lagi. Hal ini menjadikan wacana dan isu perempuan menjadi isu strategis baik

⁷Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca Reformasi* (Yogyakarta: LKIS, 2015) ,hlm. 47

ditingkatkan internasional, nasional, maupun local. Keterlibatan perempuan dalam politik sangat ditentukan oleh sejauhmana partai politik melibatkan perempuan. Dalam hal ini, system dan rekrutmen politik partai menjadi ssuatu yang sangat fundamental. Komitmen structural untuk mengkonfirmasi keterlibatan perempuan dalam partai politik dapat dikatakan sudah cukup maju.

Seperti yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah memiliki sejarah panjang sebagai sebuah partai, yang didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 sebagai fusi dari empat partai islam pada waktu itu. Pada awal berdirinya, PPP merupakan partai yang berasaskan islam. Namun kemudian Orde Baru mengharuskan PPP mengubah asas partai menjadi Pancasila. Sejalan dengan angin reformasi dan demokratisasi, sejak pemilu 1999 PPP menyatakan diri kembali ke asas islam. PPP memiliki misi untuk memperjuangkan tatanan yang demokratis dengan dilandasi *akhlakul karimah*.

PPP memandang bahwa keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan adalah hak bagi seluruh umat, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan sesungguhnya memiliki peran yang sama didalam dunia politik. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik dalam prespektif islam adalah sama dengan laki-laki, dalam rangka *amar ma'ruf nabi munkar*. berpolitik yang dilandasi dengan etika dan nilai islam adalah suatu bentuk ibadah.

Namun demikian, melihat realitas dalam masyarakat yang dimana keterlibatan perempuan didunia politik atau akses perempuan dalam hal politik sangat terbatas, maka PPP sepakat bahwa pemberdayaan politik perempuan sangat diperlukan, terutama dalam lingkup internal partai yang biasa disebut dengan kaderisasi. Sebuah partai yang yang menjadi partai pengusung Hj. Munjidah Wahab sebagai calon wakil bupati Jombang membuktikan komitmennya terhadap pemberdayaan politik perempuan.

Ketika keterlibatan perempuan itu terealisasi, maka akan memunculkan sedikit demi sedikit produk undang-undang yang

ramah gender, karena ketika berbicara secara konstitusional di Negara demokrasi bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dengan selalu mendengungkan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik itu ia sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan.

Menjadi aktor politik perempuan seringkali dalam posisi yang sulit untuk berjuang menegakkan drajat hak politiknya. Seperti halnya majunya Hj. Munjidah Wahab binti Kh.Wahab Hasbullah yang dilahirkan di Jombang pada tanggal 22 Mei 1948 seorang putri yang lahir dari seorang ulama besar yakni penggagas, pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama.⁸ Ia dibesarkan dalam tradisi kultur pesantren dimana nilai-nilai islam yang humanis, inklusif dan toleran telah menjadi spirit dan inspirasi gerak kiprahnya. Melalui NU dan Partai Persatuan Pembangunan, aktualisasi nilai-nilai islam dilakukan secara konsisten yang berlangsung hingga saat ini.

Terlahir sebagai aktifis perempuan di Jombang, Ia mengikuti jejak dari ayahandanya yang spirit perjuangan dari sang ayah menjadi saksi perjalanan bangsa yang telah menitis dalam sanubarinya. Sehingga diusia yang masih belia sudah ikut berpartisipasi aktif di garda perjuangan. Dimulai sejak tahun 1965 pada tragedi berdarah G30S/PKI, Ia memiliki andil yang besar dalam melawan kekejaman kaum sosialis atheis tersebut bersama elemen bangsa yang lain karena saat itu aktif sebagai bendahara KAPPI Cabang Jombang.

Berproses di NU juga sudah Ia lakoni sejak kecil karena dari ayah dan ibundanya selalu mengajak putra-putrinya mengikuti kemana saja ada kegiatan *jamiyah*, utamanya *Muktamar NU*. Sehingga organisasi Ikatan Pelajar Putri NU diikuti sejak dini dan akhirnya dipercaya menjadi ketua pada periode 1965-1968. Berkhidmat di NU terus dijalani sampai sekarang ini, selepas dari IPPNU langsung aktif dalam organisasi keputrian NU yaitu Fatayat (1969-1072) , awal bergabung dengan fatayat

⁸ <http://cvberdakwah.com/2014/11/nvai-hi-mundiidah-wahab-wakil-bupati-iombang-yang-selalu-bugar> diakses pada tanggal 14 Februari 2016 pukul 09.59 WIB

langsung dipercaya masuk dalam jajaran pengurus harian, tepatnya menjadi ketua II PC Fatayat NU Jombang, dengan berbekal pengalaman memimpin IPPNU, kemudian tidak cukup disitu Ia kembali dipercaya menjadi ketua umum PC Fatayat NU Jombang selama satu periode, dan ditengah khidmatnya di Fatayat Ia juga dipercaya untuk masuk dalam jajaran kepengurusan harian PC Muslimat NU Jombang sebagai sekretaris⁹.

Tahun 1984, Hj. Mundjidah muda diberi mandat memimpin PC Muslimat NU Jombang untuk pertama kali. Namun dengan adanya peraturan larangan rangkap jabatan buah dari Muktamar NU Situbondo, maka posisi Ketua PC Muslimat NU Jombang harus ditanggalkan, karena pada saat bersamaan masih sebagai anggota DPRD Jombang dari PPP. Dan baru pada 1999 untuk kali kedua posisi Ketua PC Muslimat NU Jombang dipercayakan kepadanya.¹⁰

Pengalaman berorganisasi di NU telah menjadikannya semakin memahami karakter warga NU. Kemampuan berorganisasi telah menghantarkannya duduk di kursi wakil rakyat sejak 1971 hingga 2012. Berawal dari Fraksi NU DPRD Kabupaten Jombang (1971-1977) berlanjut selama tiga periode aktif di Fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jombang. "Ini sebagai buah kebijakan fusi partai pada masa penguasa Orde Baru yang meleburkan Partai NU ke dalam PPP," katanya. Dan mulai 1997 hingga 2012 aktif di DPRD Jawa Timur dalam Fraksi Persatuan Pembangunan serta sekarang hingga 2018 menjadi Wakil Bupati Jombang.¹¹

Motivasi yang lahir dari dalam diri untuk selalu menerapkan nilai-nilai islam yang pembawa rahmat bagi seluruh alam selalu menjadi spiritnya dalam berjuang sebagai wakil rakyat yang merupakan kewajiban bagi dirinya untuk ikut

⁹Wawancara dengan Hj. Munjidah Wahab tanggal 1 Februari 2016

¹⁰ Wawancara dengan Hj. Munjidah Wahab tanggal 1 Februari 2016

¹¹ Wawancara dengan Hj. Munjidah Wahab di Jombang, tanggal 01 Februari 2016.

terlibat aktif dalam memperjuangkan hak-hak hak kaum perempuan Indonesia khususnya Jombang.¹²

Peluang dan tantangan sebagai aktor politik tentu dialami olehnya, Ia sebagai ibu rumah tangga, ketika berkiprah dalam dunia publik "selalu izin suami dan keluarga. harus ada dukungan keluarga, suami mengizinkan karena suami juga adalah tokoh masyarakat" ungkapny. Pergaulan yang luas dalam berorganisasi tentu sebagai perempuan harus bisa menjaga diri. Mental melawan dominasi laki-laki, bekerja secara luwes professional, dengan tetap berada dalam jalur-jalur yang digariskan sebagai perempuan yang sholehah.¹³

Misi sebagai kaum pesantren yang terjun dalam dunia politik merupakan suatu hal yang wajib bagi Hj. Munjidah Wahab untuk terus berkiprah dalam dunia publik yang ingin membawa nilai-nilai islam menjadi sebuah ajaran untuk memberikan warna baru bagi dunia politik melalui kemunculanya dalam dunia politik. Dengan beberapa hal yang menjadi kebijakannya yang salah satunya adalah ketika hari-hari besar islam di Jombang selalu diadakan doa bersama di setiap tempat ibadah umat islam.¹⁴

Adapun sebagai perempuan yang terjun dalam dunia politik tentu harus bisa mengimbangi pola kehidupannya, antara rumah tangga dan publik, ini menjadi pembelajaran bagi semua perempuan ketika memilih karir diluar rumah dengan selalu mengatur waktu mendidik anak dengan tanggung jawab kerja, dalam hal ini, Hj. Munjidah memilih untuk mendidik anak sekaligus bertanggung jawab terhadap profesinya dengan cara mengajak anak-anaknya untuk ikut kampanye dan kunjungan yang bersifat edukatif.¹⁵

Hj. Munjidah selalu berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan profesinya sebagai wakil bupati Jombang, Ia

¹² Wawancara dengan Hj. Munjidah Wahab tanggal 1 Februari 2016

¹³ Wawancara dengan Hj. Munjidah Wahab tanggal 1 Februari 2016

¹⁴ Wawancara dengan Hj.

¹⁵ Wawancara dengan Hj.

berfikir kritis ketika ada rapat pembentukan Perda dan kebijakan-kebijakan lainnya. Sehingga kecerdasan sangat dibutuhkan dalam dunia politik yang syarat dengan godaan. Tidak hanya itu dalam segi finansial aktor politik harus mampu untuk memobilisasi massa.¹⁶

Tindakan Politik Hj. Munjidah Wahab: Membongkar Dominasi Laki-laki dalam Kontestasi Pilkada di Jombang

Di tengah berbagai hambatan, baik hambatan kultural maupun structural diatas, sesungguhnya ada banyak peluang bagi perempuan untuk tampil dalam ranah politik, baik di level lokal maupun nasional. Namun, bersamaan dengan itu juga muncul banyak tantangan yang menghadang. Adapun peluangnya adalah adanya regulasi politik yang telah memberikan ruang bagi perempuan, kemuculan pemikiran yang ramah perempuan atau feminisme dari kalangan pemuka agama, potensi kader perempuan yang secara kuantitatif sangat banyak, serta potensi pemilih perempuan sangat signifikan, yang jumlahnya sama dengan pemilih laki-laki.

Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh kaum perempuan adalah regulasi politik yang telah memberikan afirmasi belum dilaksanakan secara konsisten di tingkat lapangan, baik oleh penyelenggara pemilu maupun partai politik, kemudian pemahaman feminisme belum menjadi kesadaran kolektif dalam masyarakat.

Apabila melihat masa perodesasi kepemimpinan wilayah Eksekutif di Jombang Hj. Munjidah Wahab menjadi perempuan pertama kali yang masuk dalam kontestasi Pilkada 2014 silam. Yang selama ini lembaga Eksekutif di Jombang selalu diduduki oleh kaum laki-laki.¹⁷

Masuknya Hj. Munjidah Wahab sebagai wakil Bupati di Jombang, melalui proses yang sangat panjang, dengan budaya kota yang selalu di dalam kepemimpinan laki-laki, Ia berusaha untuk masuk dengan cara melakukan komunikasi-komunikasi

¹⁶ Wawancara dengan Hj.

¹⁷ Wawancara dengan Hj. Munjidah Wahab tanggal 1 Februari 2016

politik dengan bekalnya selama kurang lebih 38 tahun menjabat sebagai wakil rakyat.¹⁸

Hj. Munjidah dapat mengikuti kontestasi politik di Jombang, dengan modal politik yang dimilikinya, membuatnya bisa maju dalam kontestasi politik tersebut, antara lain yaitu: 1. Modal simbolik, dimaknai sebagai hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang sifatnya *given* dan berakibat pada prestise dan kemashuran yang diperoleh dari keluarga atau nama yang disandang oleh Hj. Munjidah sebagai putri dari KH. Wahab Hasbullah salah satu pahlawan di Indonesia. 2. Modal Kultural yang berkaitan dengan kedalaman pengetahuan (intelektualitas) Hj. Munjidah yang tidak harus ditentukan oleh perolehan ijazah pendidikan, tetapi berkaitan dengan pendidikan karakter yang dialaminya yang diperoleh dari ayahanda dan ibundanya serta dalam dunia pesantrennya. 3. Modal ekonomi berupa perjuangan dari Hj. Munjidah Wahab dalam bekerja memperoleh harta juga berupa harta yang diwarisinya, berupa pesantren dan tanah yang bisa digunakan sebagai suatu lembaga. Dengan demikian modal-modal tersebut menjadi peluang bagi Hj. Munjidah Wahab untuk melakukan perannya dalam dunia politik .

Dengan beberapa modal politik yang dimilikinya Hj. Munjidah berusaha merubah Paradigma dari masyarakat tentang kepemimpinan perempuan serta makna peran perempuan dalam dinamika politik Indonesia yang sesuai dengan kaidah-kaidah islam melalui pengajian-pengajian yang dilakukan oleh organisasi IPPNU, Fatayat NU, Muslimat NU, Wanita Persatuan Pembangunan (WPP), serta pimpinan dari Pondok pesantren putri yang dipimpin olehnya selama ini.

Ia berusaha memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya perempuan terlibat aktif dalam politik, yang mana secara konstitusional, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara Indonesia yang dalam hal ini sudah tertulis dalam UUD 1945 pasal 28 yang menegaskan bahwa hak warga Negara dan penduduk

¹⁸ Wawancara dengan Hj. Munjidah Wahab tanggal 1 Februari 2016

untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Ini merupakan cerminan bahwa perempuan memiliki kesempatan sebagai pemimpin.

Dengan tindakannya dalam kontestasi Pilkada di Jombang bahwa perempuan mempunyai peran yang sama dengan laki-laki, karena menurutnya dominasi laki-laki tidak selamanya menang atas perempuan, karena perempuan mempunyai potensi yang sangat besar dengan dibuktikan banyaknya pemilih perempuan pada Pilkada Jombang semasa Hj. Munjidah mencalonkan diri menjadi wakil bupati.

Variabel-Variabel Pendukung dan Terpilihnya Hj. Munjidah Wahab Sebagai Wakil Bupati Jombang

Ada dua Variabel yang mendorong masuk dan terpilihnya Hj. Munjidah Wahab Sebagai Wakil Bupati Jombang yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat Kapabilitas yang tinggi

Hj. Munjidah yang memiliki tingkat kepercayaan dari masyarakat yang sudah banyak merasakan perjuangannya selama 38 tahun terjun dalam politik, dengan modal politik yang dimilikinya serta pengalamannya duduk di parlemen puluhan tahun dan putri dari pendiri salah satu pondok pesantren terbesar di Jombang. Memiliki keberanian untuk menyuarakan perubahan. Dengan pengalamannya di organisasi masyarakat, yaitu IPPNU, Fatayat, dan Muslimat.

Ada beberapa aksi dan strategi yang dilakukan oleh Hj. Munjidah dalam mencapai tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat antara lain sebagai berikut:¹⁹

a. Strategi dan Aksi Politik terhadap Negara

Didalam suatu Negara ada beberapa lembaga-lembaga Negara, parlemen dan partai politik. Lembaga-lembaga Negara dalam hal ini adalah pemerintah dan birokrasi, yang merupakan institusi pemegang kekuasaan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam dunia politik. Yang diharapkan dapat

¹⁹ Wawancara dengan tim sukses Hj. Munjidah Wahab tanggal 01Februari 2016

menjadi perubahan besar terhadap kebijakan- kebijakan prosedural yang ramah terhadap perempuan, menjamin keberlanjutan dan peningkatan akses perempuan keparlemen, yang dibuktikan dengan masuknya Hj. Munjidah dalam parlemen selama beberapa periode, hal ini dapat berpengaruh pada legislasi dengan memastikan bahwa ia sudah memperhitungkan keprihatinan terhadap perempuan. Dan ia berusaha untuk mengubah bahasa parlementer sehingga perspektif perempuan menjadi suatu hal yang wajar dan mendorong perubahan sikap terhadap perubahan perempuan.

b. Strategi dan aksi terhadap Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu gabungan antara individu satu dengan yang lainnya, yang berada pada satu tempat. Yang biasanya terdiri dari keluarga, komunitas, lembaga pendidikan dan keagamaan, organisasi sosial, kelompok budaya. Hj. Munjidah memberikan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik.

c. Membuat jaring an aktivis perempuan

Jaringan aktivis perempuan sangat penting, karena merupakan bentuk kerjasama antara perempuan untuk bisa melakukan perubahan besar yang berkeadilan gender. Dalam hal ini Hj. Munjidah mempunyai jaringan struktur baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Serta ia juga mempunyai jaringan sosial perempuan didalam naungan organisasi masyarakat NU.

Komitmen untuk mensejahterakan masyarakat yang Ia wakili, berangkat dalam sanubarinya yang ingin setiap kebijakan melahirkan keadilan dan kesetaraan yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Karena Hj. Munjidah berpandangan bahwa demokrasi tidak akan tercapai jika perempuan tidak memperoleh kesempatan dan akses yang sama dengan laki-laki, khususnya dalam pengambilan keputusan. Jaminan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga publik merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Jika hal ini terpenuhi maka masyarakat demokratis yang didambakan akan tercapai.

2. Figur Politik dan Publik

Hj. Munjidah dapat mengikuti kontestasi politik di Jombang, karena beberapa hal yang salah satunya adalah figur politik dan publik, figure tersebut tidak melekat begitu saja dalam dirinya, tetapi ada modal politik yang membuatnya bisa maju dalam kontestasi tersebut, Sebagai pimpinan dari salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur yang tingkat popularitasnya dikenal oleh seluruh elemen masyarakat, tentunya Hj. Munjidah sudah mempunyai massa yang jelas dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya.

Perempuan di partai politik diusahakan sekeras mungkin masuk dalam pengurus harian, ketua atau sekretaris, melakukan terobosan ke pusat-pusat kekuasaan dengan cara melakukan komunikasi politik yang intens pada pimpinan teras partai, eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Selain itu, perempuan harus bisa memperluas lingkup keterlibatan perempuan pada tingkat akar rumput dari gerakan perempuan.

Pendekatan yang dilakukan oleh Hj. Munjidah Wahab kepada kaum perempuan dengan mengikuti acara-acara yang diadakan oleh Fatayat, Muslimat NU selalu menyelipkan tentang pentingnya keterlibatan perempuan untuk masuk dalam dunia politik, agar perempuan-perempuan muslim tidak tertinggal dengan perempuan agama lain.

Pengalaman menjadi pejabat publik yang melibatkan pemilihan umum juga sering Ia ikuti dalam kontestasi politik, sehingga lebih mudah untuk memobilisasi massa sebanyak-banyaknya karena figur yang sudah terkanal dalam masyarakat.

Hj. Munjidah Sebagai Aktor Pendobrak Politik Dominatif Laki-laki

Praktik budaya patriarki yang membelenggu perempuan untuk tetap dalam ranah domestic dan tidak tampil dalam ranah public, menyebabkan keterlibatan perempuan dalam berpartisipasi dalam dunia politik sangat rendah. Mayoritas masyarakat Jombang yang masih didominasi oleh cara pandang dan sikap yang cenderung melihat serta memperlakukan

perempuan sebagai pelengkap kaum laki-laki, persepsi semacam ini, tidak jarang pada akhirnya melihat dan menempatkan kaum perempuan sebagai pelengkap laki-laki.

Dominasi laki-laki merupakan budaya kultur yang merupakan hambatan yang cukup fundamental karena kultur atau budaya akan membentuk persepsi, dan persepsi pada akhirnya akan bermuara pada pola berfikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bersama untuk meluruskan cara pandang budaya yang kurang tepat dalam memahami dan memandang kaum perempuan sehingga kaum perempuan dapat memainkan peran dan fungsinya lebih maksimal lagi.

Dalam upaya mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia politik, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Hj. Munjidah Wahab sebagai wakil Bupati Perempuan pertama kali di Jombang, Ia mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi terhadap hambatan-hambatan yang ada. Disamping problem struktural, faktor lain yang menghambat keterwakilan perempuan masuk dalam kontesatasi politik adalah problem kultural.

Problem kultural ini dipengaruhi oleh banyak hal, seperti pendidikan, pemahaman keagamaan, interaksi dengan masyarakat, keluarga dan lain sebagainya. Semua itu sangat berpengaruh. Adapun pengaruh yang sangat besar adalah pendidikan dan pemahaman keagamaan. Untuk itu diperlukan langkah strategis untuk mengembangkan pendidikan gender dan kesadaran akan hak-hak perempuan. Demikian juga pemahaman yang terkait dengan keagamaan, diperlukan pembaruan pemahaman keagamaan yang lebih ramah perempuan di kalangan masyarakat.

Ditengah persoalan yang dihadapi, baik persoalan struktural yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan maupun persoalan kultural yang belum mendukung keterlibatan perempuan dalam dunia politik, politik perempuan dari tahun ketahun mengalami kemajuan, dalam hal representasi perempuan di partai politik, kini semua partai politik sudah lebih terbuka terhadap perempuan serta

memberikan ruang kepada perempuan untuk berkibrah dan bahkan menempati ruang-ruang yang strategis.²⁰

Hj. Munjidah mengatakan bahwa "Posisi perempuan menurut kaum pesantren berbeda dengan zaman dulu, Ia berusaha memberikan kesadaran dan merubah pola berfikir masyarakat patriarkhi, dengan menunjukkan eksistensinya dalam dunia publik selama ini, ia menegaskan bahwa perempuan mempunyai talenta dan kemampuan yang sangat luar biasa ketika ia dipercaya dan diberikan kesempatan".

Spirit dari ayahanda yang selalu dipegang erat, kecintaanya pada politik menjadi salah satu motivasinya terjun dalam dunia politik yang kuat dan membuatnya pantang menyerah. Kerja keras dan pengabdianya sejak muda bergabung dengan organisasi kemasyarakatan membuatnya banyak pengalaman. Sehingga strategi untuk mewakili perempuan masuk dalam wilayah Eksekutif Jombang mampu mendulang suara perempuan sangat banyak.

Dominasi laki-laki membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mendobraknya, dominasi tersebut seringkali dibungkus dengan nilai-nilai sosial, perangkat hukum, pertimbangan kesehatan dan bahkan dengan simbol-simbol agama dan budaya, sehingga strategi Hj. Munjida wahab dalam keterlibatannya di pilkada 2014 silam yaitu melakukan aksi-aksi sosial yang ramah perempuan, pengajian ibu-ibu di desa hingga dusun dengan mengoptimalkan modal politik yang dimilikinya.

Analisis Aktor Perempuan dalam Kontestasi Politik di Jombang: Perspektif Politik Islam

1. Perempuan Sebagai Aktor

Perempuan adalah makhluk dan hamba tuhan seperti juga laki-laki, sebagai hamba tuhan ia juga memiliki tanggung jawab kemanusiaan, memakmurkan bumi, mensejahterakan manusia. Untuk tugas-tugas seperti itu kaum perempuan tidak dibedakan dengan laki-laki, Tuhan memberikan kepada mereka, laki-laki dan perempuan, potensi dan keahlian atau

²⁰ Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca Peformasi*, (Yogyakarta: Lkis, 2015), hlm. 44

kemampuan- kemampuan untuk berindak secara mandiri dan bertanggung jawab untuk menunaikan sesuatu yang diamanahkan kepada mereka.

Teks-teks ayat suci menegaskan keharusan untuk saling kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk tugas-tugas pengaturan dalam kehidupan di dunia ini. Laki-laki dan perempuan yang beriman, menurut al-qur'an saling kerjasama untuk menunaikan tugas keagamaan: menyerukan kebaikan dan menghapus kemungkaran.

Dalam islam perempuan mendapatkan tempat dan derajat yang tinggi, perempuan mendapatkan hak yang penuh, merdeka atas pikiran dan tindakannya yang tetap pada jalur nilai-nilai dan etika dalam agama islam, didalamnya memuat hak-hak yang sama antar umat manusia, tidak memandang status sosial, jenis kelamin, ras, bangsa dan lain sebagainya.

Sejarah juga mencatat peran istri dari Rosulullah yaitu Siti Khadijah sangat mendukung Rasulullah dalam perjuangannya menyebarkan islam. Khadijah adalah perempuan pertama yang masuk islam dan berkorban untuk kejayaan islam. Begitu pula dengan Aisyah, sang istri cerdas yang menjadi salah seorang narasumber *hadits sahib*. Aisyah dapat dinggap sebagai jendela pengetahuan bagi peradaban islam. Pada masa Nabi Muhammad, perempuan juga dilibatkan dalam peperangan, dalam medan pertempuran hal ini terjadi, ketika istri-istri sahabat dikerahkan untuk berangkat ke medan perang sebagai perawat yang tangguh dan cekatan.²¹

Juwariyah binti Harits adalah istri dari Rosulullah yang berperan sebagai juru damai antara kaum muslimin dan kelompok Bani Mustholiq. Adapun Sofiyah binti Hay adalah istri Raulullah yang berperan aktif dalam diterimanya islam oleh kalangan kaum Khaibar. Hindun binti Abi Umayyah, sebelum menjadi istri Rosulullah, selalu mendukung suaminya untuk maju berperang yang kemudian syahid dalam perang Uhud. Hafsah binti Umar merupakan perempuan pertama yang merasakan penderita hijrah. Peran aktifnya dalam perjuangan,

²¹ Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2015)

diantaranya yaitu selalu mendukung suaminya pergi berperang, Ia ihlas menerima kesyahidan suaminya dalam perang Uhud. Dan ia juga orang yang menyimpan naskah Al-Quran yang kemudian bisa dipertahankan sampai sekarang.

Kaum perempuan muslim pada masa awal perkebangan islam, juga ikut berperang melawan musuh-musuh islam. Sebagaimana diulas Imam Bukhori dalam *Shahihnya*, pada masa awal yang diantaranya adalah para istri Rosulullah turun ke medan Uhud untuk membatu dan merawat pasukan yang terluka. Aisyah dan para muslimah lain, membawakan air untuk pasukan muslim yang dahaga dan terluka di medan perang. Bahkan ada juga, yang masuk ketengah-tengah pasukan perang untuk memapah atau menggotong yang terluka, serta memindahkan mereka yang syahid.²²

Perempuan pertama muslimah yang berani menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam membunuh musuh adalah Syafiah, bibi Rasulullah, yaitu dalam perang *Khondaq*. Saat itu Syafiah bersama para perempuan lain dan anak-anak berada ditenda persembunyian dalam kepungan tentara bani Quraidzah. Satu- satunya laki-laki muslim yang menemani mereka adalah Hasan Ibn Tsabit. Situasi yang rawan itu akhirnya diketahui juga oleh seorang yahudi. Khawatir tempat persembunyian mereka dibocorkan, Syafiah meminta Ibn Tsabit untuk membunuh yahudi tersebut. Tetapi Hasan Ibn Tsabit tidak berani, maka Syafiah kemudian keluar dari benteng mengambilkayu panjang dari tenda dan membunuh yahudi tersebut.²³

Masih banyak lagi kisah lain yang mengungkap heroisme perempuan dalam perjuangan penyebaran islam, betapapun heroisme tersebut lebih bersifat fisik . karena tuntutan pada saat itu adalah untuk mempertahankan diri dari kaum *Musyrikin*. hal ini tentu berbeda dengan perjuangan pada masa sekarang, yang dimana perang secara terbuka nyaris tidak ada.

Hal tersebut membuktikan bahwa perempuan juga

²² Ibid., hlm 35

²³ Ibid., hlm. 38

mempunyai hak untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kecerdasan dan berkiprah dalam dunia profesional. Ada seorang sahabat perempuan yang ahli dalam bisnis, seorang janda bernama Ummul Qusyairiyah. Ia diberi izin oleh Rosulullah untuk mengelola bisnis di pasar. Ini berarti, Rosulllah memberi ruang yang luas bagi perempuan untuk mengembangkan diri.²⁴ Fakta ini enunjukkan bahwa islam tidak memasung peran perempuan, melainkan menjamin hak-hak sekaligus meindungi perempuan, dengan etika-etika kehidupan sebagai pesan penting dari islam.

Namun dalam perjalanan sejarah politik islam partisipasi politik perempuan mengalami degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Pembatasan-pembatasan seperti ini, bukan hanya terbaca dalam buku- buku yang diajarkan disekolah, madrasah, perguruan tinggi, majlis ta'lim dan sejenisnya, tetapi anggapan tersebut juga muncul dalam ruang-ruang sosial.

Dalam sejarah politik islam, sejak wafatnya Nabi Muhammad dan masa *Khulafa Al Rasyidin* sampai awal abad 20 tidak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran-peran publik dan politik. Secara umum alasan perempuan diposisikan dalam wilayah domestik, bahwa perempuan memiliki kecerdasan intelektual yang terbatas dan lebih rendah daripada laki-laki. Anggapan bahwa kecerdasan perempuan lebih rendah tersebut dikemukakan oleh banyak sekali ahli tafsir atas bunyi literal teks Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, mereka menganggap bahwa hal itu merupakan pemberian tuhan, yang tidak dapat dipertukarkan.

Berbeda dengan pandangan diatas, Ibnu Rusyd seorang ahli hukum besar sekaligus filsuf terkemuka menyampaikan pandangan yang sangat menarik. Ia mengatakan dalam bukunya "*Talkhis al-Siyasah Li Aflathor*:"sepanjang para perempuan tumbuh dan besar dengan kecerdasan dan kapasitas intelektual yang cukup, maka tidaklah mustahil, kita akan menemukan

²⁴ Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: LKIS, 2015)

diantara mereka para filosof, para pemimpin publik - politik dan semacamnya". Suatu hal yang layak memberikan kesempatan kepada mereka yang mempunyai talenta dalam bidang yang perempuan pilih. Dan hal itu bisa terjadi ketika adanya persamaan akses antara laki-laki dan perempuan.²⁵

Pandangan-pandangan keagamaan klasik diatas kini berhadapan dengan dinamika sosial yang semakin terbuka lebar pada dewasa ini. Keterbukaan ruang bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan sampai setinggi-tingginya telah melahirkan kemampuan-kemampuan mereka dalam berbagai bidang, yang sebelumnya diklaim itu milik laki-laki. Persepsi tendensius bahwa perempuan kurang rasional bahkan lebih emosional daripada laki-laki kini anggapan tersebut telah gugur dan tidak lagi populer di masa sekarang.

Kaum perempuan kini, bergerak untuk mencapai masa depannya dan mengubur masa lalu yang diskriminatif dan bias gender. Sejak abad 20 sejumlah Negara Islam menggeliat menggugat otoritas patriarkisme, subordinasi, diskriminasi, dan peminggiran perempuan dari ruang publik atau politik disadari tidak adil dan telah merugikan semua orang. Status perempuan dalam hukum akhirnya harus mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Melalui amandemen dan revisi atas undang-undang, hak perempuan mengalami kemajuan, perempuan-perempuan di Negara-negara tersebut muncul dalam ruang-ruang sosial, politik, ekonomi dan budaya. membuktikan bahwa mereka mampu berdampingan secara sinergis dengan kaum laki-laki.

Seperti yang diungkapkan oleh Hj. Munjidah kisah-kisah tentang kecerdasan, keberanian dan peran strategis perempuan dari pelbagai zaman., haruslah menjadi inspirasi. Dimasa kini, perempuan-perempuan dari Nahdlatul Ulama, atau yang terkoordinasi dalam IPPNU, Fatayat, dan Muslimat. Harus berani tampil untuk menebar pencerahan kepada bangsa untuk membawa perubahan yang ramah akan hak-hak perempuan.

²⁵ *Ibid.*, hlm 6

2. Tindakan Politik Perempuan

Tindakan perempuan untuk terlibat dalam dunia politik mendapat banyak rintangan, tetapi dengan berbagai hal yang dilakukan oleh banyak perempuan dengan mengorganisir para perempuan untuk kepentingan bersama adalah suatu bentuk kekuatan untuk menghadapi segala hambatan dan rintangan.

Dalam hal ini penulis mengutip gerakan-gerakan perempuan Nahdlatul Ulama, yang biasa disebut dengan muslimat mempunyai sebuah Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) sebagai wadah untuk mempersatukan gerak langkah organisasi-organisasi wanita islam dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama. Untuk mencapai tujuan yang mereka idam-idamkan, muslimat NU melaksanakan beberapa program untuk menunjang keterlibatan perempuan didunia publik, antara lain sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan mendalami serta mengamalkan ajaran islam sebaik- baiknya
- b. Mempersatukan gerak dan langkah kaum perempuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan diridhoi Allah SWT.
- c. Melaksanakan nilai budi pekerti utama dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Meningkatkan kualitas wanita Indonesia untuk memperkuat rasa tanggung jawab terhadap agama, bangsa dan Negara.
- e. Mengusahakan agar wanita Indonesia menjadi istri dan ibu yang baik, guna pertumbuhan bangsa yang taat beragama.
- f. Bergerak aktif dalam peribadatan, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, hukum, ekonomi, tenaga kerja, dan lain sebagainya
- g. Membina kerjasama dengan badan-badan organisasi wanita dan lembaga lain.

Dalam proses globalisasi sebagai sebuah akibat dari kemajuan teknologi komunikasi yang diiringi dengan semakin banyaknya arus informasi, terjadi perubahan secara terus menerus dan pergeseran tata nilai yang menngoyahkan tradisi

yang telah mapan. Dalam kaitan ini, harus tetap memberikan kewaspadaan agar proses perubahan yang sedang berlangsung tidak akan menjerat dan membawa kemerosotan derajat dan martabat perempuan dengan dalih untuk mengejar kemajuan.

Selain itu, juga harus diperhatikan nilai ajaran agama yang berfungsi selain sebagai tolak ukur untuk menentukan kebenaran dan keabsahan suatu perbuatan, juga sebagai penyaring unsur-unsur yang bertentangan dengan tata aturan sosial dan adat istiadat. Sehingga dengan demikian, nilai-nilai agama dapat menjadi landasan moral dan etika bagi kemajuan perempuan.²⁶

Merubah paradigma berfikir melalui perubahan hukum adalah salah satu langkah yang harus dilakukan oleh kaum perempuan. Perubahan hukum disebabkan oleh perubahan masa, tempat, dan perilaku. Ketiga hal itu berhubungan dengan budaya kolektif, sehingga dalam satu kaidah disebutkan bahwa budaya adalah sumber hukum. Perubahan hukum ini, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat yang sifatnya kontekstual, sesuai dengan ruang dan waktu atau perkembangan zaman. Selama budaya yang ada tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka budaya tersebut diakomodir dalam syariat agama.²⁷

Sejalan dengan pemikiran gus dur, bahwa semua produk hukum, baik itu yang bersumber dari al- qur'an maupun hadits, harus dicari informasi sebanyak- banyaknya tentang akar kesejarahannya. Para ulama dan kyai juga harus memiliki kejelian yang sama. Apabila tidak, para ulama dan kyai sebagai salah satu sumber hukum di masyarakat bisa terombang- ambing, bahkan mengombang- ambing diri (mempermainkan hukum untuk memihak pada pihak yang menguntungkan) dalam permasalahan yang berkembang didalam kehidupan umat yang terus bergerak.

²⁶ Zidna Karimatunnisa, *perempuan berpolitik prespektif NU* (Skripsi Jurusan Siyasa 2015) hlm 64

²⁷ *Ibid.*, hlm. 93

3. Perempuan Sebagai Aktor Pendobrak Dominasi Laki-laki

Sistem budaya patriarki yang berkembang di masyarakat Jombang juga menjadi struktur sosio-religius yang menempatkan posisi laki-laki sebagai orang pertama yang harus dihormati. Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang mendukung dan membenarkan dominasi laki-laki, sehingga menimbulkan pemusatan kekuasaan dan *previlige* di tangan kaum laki-laki dan mengakibatkan kontrol dan subordinasi perempuan serta menciptakan ketimpangan-ketimpangan sosial.

Budaya patriarki adalah kebiasaan-kebiasan masyarakat yang dijadikan warisan sosial dengan memposisikan laki-laki sebagai penguasa atau penentu kebijakan atas semua kehidupan sosial manusia. Secara kultur sistem patriarki tersebut merupakan sebuah konstruksi sosial terhadap relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Adapun bentuk konstruksi sosial ini, ada berupa anggapan- anggapan masyarakat, mitos-mitos dan suatu kebiasaan yang sudah dilakukan yang dianggap suatu kewajaran dalam kehidupan sosial.

Problematika utama yang dihadapi perempuan, ketika terjun dalam dunia politik adalah ketika ia memutuskan masuk dalam sebuah tradisi atau budaya politik yang telah lama terkonstruksi secara patriarki menjadi factor utama yang menjadi hambatan bagi perempuan secara total didunia politik. Seperti halnya di Jombang yang selama berdiri menjadi sebuah kabupaten atau kota tidak ada satu perempuan pun menjadi bupati maupun wakil bupati.

Melihat masa perodesasi eksekutif di Jombang, merupakan bukti bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik di daerah Jombang sangat rendah. Namu tahun 2014 yang lalu, dalam kontestasi pilkada di Jombang telah dibuktikan oleh seorang perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kontestasi politik, yaitu Hj. Munjidah wahab yang menjadi wakil dari H. Nyono Suharli Wihandoko sebagai bupati Jombang sekarang ini.

Majunya perempuan dalam kontestasi Politik selalu dihadapkan dalam sistem sosial yang menghambat keterlibatan

perempuan, dogma-dogma agama, adat istiadat atau tradisi yang diyakini oleh masyarakat setempat, membangun wacana struktur kehidupan yang mengkondisikan bisa menghalangi perjuangan kaum perempuan. Wacana mampu mengartikan dan mengambil sikap hidup manusia.

Penindasan melalui wacana itu tampak jelas dari pengalaman lingkup public bahwa subyek pembicara didominasi oleh laki-laki. Kalau laki-laki mendominasi wacana, maka acuan pada dunia yang digambarkan atau direpresentasikan tentu sesuai dengan keinginan, kepentingan dan nilai-nilai laki-laki. Yang menjadikan laki-laki sebagai pusat dan kriteria segala sesuatu.²⁸

Untuk keluar dari penindasan dan ketidakadilan yang diakibatkan oleh wacana laki-laki, cara yang mungkin ialah melakukan penafsiran kembali wacana tersebut. Harus ada penafsiran ulang pemikiran-pemikiran filsafat, teologi, produk-produk hukum, norma-norma moral dan agama dan sebagainya. Model penafsiran harus memperhitungkan unsur temporalis dari wacana atau sifat kesejarahan dari pemahaman, melakukan kritik ideology, dan mengadakan dekonstruksi atau pembongkaran wacana laki-laki.

Pendobrakan dilakukan dengan sikap kritis terhadap kesejarahan pemahaman atas prasangka-prasangka dan ilusi-ilusi yang menjadi bagian dari wacana laki-laki. Memuat prasangka yang sarat dengan nilai kelaki-lakian dan mempertahankan status quo dominasi laki-laki. Ilusi bahwa superioritas nyata laki-laki cukup untuk memberikan membenaran atas segala tindakannya, seperti membuat hukum dan memberlakukannya.

Oleh karena itu hal yang harus dilakukan oleh perempuan dalam membongkar dominasi laki-laki adalah dengan cara membongkar motivasi- motivasi yang disadari dan yang terselubung, serta kepentingan laki-laki yang melekat pada wacana politik, filosofis, teologis dan lain sebagainya. Dengan ketiga jalan itu, dominasi laki-laki melalui wacana dibongkar

²⁸ <http://www.averroes.or.id/dominasi-laki-laki-melalui-wacana.html>
diakses tanggal 08 maret 2016

menjadi wacana baru yang peduli akan nasib dan hak perempuan yang harus dibangun.

Terhadap dominasi kaum pria yang berperan dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam bidang fiqh dan tafsir selama berabad-abad, harus ada usaha serius dari segala lapisan, khususnya wanita untuk mengimbangnya, diantaranya adalah dengan menulis dan ceramah sesuai dengan perspektif keperempuanan.²⁹

Ada beberapa sebab munculnya konsep bias gender³⁰ adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan studi islam yang parsial
- b. Ada sejumlah Nash yang terkesan memarginalkan perempuan
- c. Merasuknya budaya local muslim terhadap konsep atau ajaran islam
- d. Merasuknya budaya atau teologi laki-laki dan struktur masyarakat patriarkal dalam formulasi hukum islam
- e. Kajian islam dengan pendekatan agama secara murni atau tekstual
- f. Peran kekuasaan sang penguasa.

Oleh karena itu alternatif pemecahan terhadap sebab-sebab tersebut adalah³¹:

- a. Ditawarkan konsep pendekatan tematik dan holistic dengan mengelompokkan nash menjadi dua yaitu: normative universal dan praktis temporal.
- b. Penting adanya pembedaan antara normative universal dengan praktis temporal, dibutuhkan pemahaman yang kontekstual, meskipun hal yang sama harus dilakukan pada jawaban pertama.
- c. Harus dilakukan pemurnian ajaran islam dari budaya-budaya local, termasuk didalamnya budaya local arab sebagai lokasi tempat turunnya nash.
- d. Perlu adanya teologi atau perspektif perempuan dalam

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazafa & Academia, 2002) hlm. 113.

³⁰ *Ibid.*, hlm 113

³¹ *Ibid.* hlm 114

- konsep-konsep islam, termasuk dalam konsep pendidikan
- e. Perlu diupayakan kajian islam yang dibantu dengan teori-teori ilmu- ilmu yang berhubungan, seperti sosiologi, antropologi, sejarah dan lain sebagainya.
 - f. Perlu adanya usaha serius dan berkelanjutan untuk memberikan pemahaman dan konsep yang benar-benar tentang ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan relasi pria dan wanita. Usaha ini dilakukan lebih khusus ditujukan kepada para pemegang kekuasaan (penguasa), tanpa melupakan masyarakat pada umumnya.

Kedudukan perempuan dalam islam, seperti yang telah disebutkan dihalaman-halaman sebelumnya, bukanlah masalah tentang teori terkaan yang abstrak maupun sejarah masa lalu. Tetapi ini masalah tentang sebuah pemahaman yang berbeda yang menimbulkan ketimpangan antara satu dengan yang lainnya.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Hj. Munjidah dapat mengikuti kontestasi politik di Jombang, dengan modal politik yang dimilikinya, membuatnya bisa maju dalam kontestasi politik tersebut, antara lain yaitu: 1. Modal simbolik, dimaknai sebagai hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang sifatnya *given* dan berakibat pada prestise dan kemashuran yang diperoleh dari keluarga atau nama yang disandang oleh Hj. Munjidah sebagai putri dari KH. Wahab Hasbullah salah satu pahlawan di Indonesia. 2. Modal Kultural yang berkaitan dengan kedalaman pengetahuan (intelektualitas) Hj. Munjidah yang tidak harus ditentukan oleh perolehan ijazah pendidikan, tetapi berkaitan dengan pendidikan karakter yang dialaminya yang diperoleh dari ayahanda dan ibundanya serta dalam dunia pesantrennya. 3. Modal ekonomi berupa perjuangan dari Hj. Munjidah Wahab dalam bekerja memperoleh harta juga berupa harta yang diwarisinya, berupa pesantren dan tanah yang bisa digunakan sebagai suatu lembaga. Dengan demikian modal-modal tersebut menjadi peluang bagi Hj. Munjidah Wahab untuk melakukan

perannya dalam dunia politik.

Hj. Munjidah yang memiliki tingkat kepercayaan dari masyarakat yang sudah banyak merasakan perjuangannya selama kurang lebih 40 tahun terjun dalam politik, dengan modal politik yang dimilikinya serta pengalamannya duduk di parlemen puluhan tahun dan putri dari pendiri salah satu pondok pesantren terbesar di Jombang. Memiliki keberanian untuk menyuarakan perubahan. Dengan pengalamannya di organisasi masyarakat, yaitu IPPNU, Fatayat, dan Muslimat.

Adapun variable yang mendorong masuk dan terpilihnya Hj. Munjidah dapat mengikuti kontestasi politik di Jombang, karena beberapa hal yang salah satunya adalah figur politik dan publik, figure tersebut tidak melekat begitu saja dalam dirinya, tetapi ada modal politik yang membuatnya bisa maju dalam kontestasi tersebut, Sebagai pimpinan dari salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur yang tingkat popularitasnya dikenal oleh seluruh elemen masyarakat, tentunya Hj. Munjidah sudah mempunyai massa yang jelas dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya.

Hal tersebut tidak terlepas dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam adanya upaya regulasi politik yang telah memberikan ruang bagi perempuan, kemuculan pemikiran yang ramah perempuan atau feminisme dari kalangan pemuka agama, potensi kader perempuan yang secara kuantitatif sangat banyak, serta potensi pemilih perempuan sangat signifikan. Oleh karena itu ketokohan seorang perempuan baik politik dan agama merupakan suatu yang niscaya dalam paradigma liberalisme dan hal ini juga dibenarkan dalam politik islam, selama tidak bertentangan dengan syariat islam.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemabannya*, Bandung: CC J ART, 2004.
- Umar, Nasaruddin *Fikih Wanita untuk Semua*, Jakarta: Serambi, 2010.
- Bari, Farzana, Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah, *Jakarta: United Nation Development Programme (UNDP) Indonesia, 2010.*
- Basyaib, Hamid, *Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- David March dan Gerry Stoker, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik ed II Cet IX* Bandung: Nusamedia, 2011.
- Fakih, Mansoer, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* Yogyakarta: Insist Press, 2011.
- Fauziah, Ida, *Geliat Perempuan Pasca Reformasi*. Yogyakarta: PT.Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Hayek, Freadrish A, *Ancaman Kolektivisme*, Jakarta: freedom Institute, 2011.
- Ishiyama, Jhon T, *Ilmu Politik Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2013
- Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazafa & Academia, 2002.
- Namawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.
- Treanor, Paul, terjemah Imron Rosyadi, & Muhammad Nastain, *Kebobongan Demokrasi*, Yogyakarta: Penerbit Wacana & Istawa, 2001.
- Dahl, Robert, *Demokrasi dan Para Pengritikannya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- M.N. Ibad, *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus dur dan Gus Miek*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.
- Sadli, Saporinah, *Berbeda Tetapi Setara*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Scumpeter, A Joseph, alih Bahasa Teguh Wahyu Utomo, *Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

- Soehino, *Ilmu Negara, cet. VIII*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008.
- Syam, Firdaus, *Pemikiran Politik Barat, ed 1 cet, 2*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muhaimin, Ahmad, "Hak-hak Politik Perempuan Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan D.I Yogyakarta", Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Rahman, A. Suaidi, "Komunikasi Partai Demokrat Pada Pemilu 2009 :Studi Deskriptif Kualitatif Pemilu Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan III Jawa Timur", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* :2014.
- Zidna Karimatunnisa, "Perempuan berpolitik prespektif NU", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2015.
- Jurnal "Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur", Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Universitas Negeri Surabaya, 2014.
- Puji Astuti, Tri Marhaeni, 2008 "Citra Perempuan dalam Politik," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, *Na 1*
- M.YusufPambudi, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/10.%20M.%20Yusuf%20Pambudi.pdf>
- Undang-Undang Dasar 1945
- eprints.walisongo.ac.id/125/1/Silvia_Tesis_BabI.pdf diakses tanggal 04 Januari 2016 pukul 08.07 Wib <http://cyb.erdakwah.com/2014/11/nyai-bi-mundji-dah-wahab-wakil-bupati-jombang-yang-selalu-bugar/>.
- <http://www.jombangkab.go.id/index.php/web/entry/dipertegas-identitas-kota-santri-.html>
- <http://www.jombangkab.go.id/index.php/web/entry/dipertegas-identitas-kota-santri-.html> diakses tanggal 04 Januari 2016pukul 08.07
- Wawancara dengan Hj. Munjidah Wahab tanggal 1 Februari 2016
- Wawancara dengan tim sukses Hj. Munjidah Wahab tanggal 01Februari 2016
- Wawancara dengan Mammud Yunus Ramli wakil Ketua DPC

PPP Kabupaten Jombang, tanggal 01 Februari 2016
Husain Muhammad <http://huseinmuhammad.net/partisipasi-politik-perempuan-dalam-islam/> diakses tanggal 05 Maret 2016